

BAB III

SISTEM PENGKADERAN PARTAI DEMOKRAT DPD D.I.Y. PERIODE

2006-2011

A. Sistem dan Bentuk Pengkaderan

Pendidikan politik sebagai salah satu bagian dari proses pembangunan politik harus mampu memberikan pengertian dan wawasan, pengetahuan serta sikap yang komprehensif terhadap nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan tersebut harus mampu memperhatikan sisi ketrampilan yang bersifat praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pengkaderan merupakan rangkaian usaha pembinaan dan pengembangan kader partai, meliputi seluruh aspek dan wawasan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola partai secara fungsional.

Agar pelaksanaan pengkaderan memiliki nilai strategis, dan dapat mencapai hasil yang mendekati paripurna, maka program pengkaderan di lingkungan Partai Demokrat harus sepantasnya terpola di dalam suatu formulasi sistem yang bersifat pragmatis, terstruktur, terarah, terpadu, dan kontinyu/berkesinambungan. Dengan tujuan, sasaran, metodologi, materi, kurikulum, evaluasi dan refleksi, serta rencana tindak lanjut yang jelas, terarah dan memadai untuk setiap jenjang perkaderan. Sehingga out put yang dihasilkan

dari suatu tahapan atau jenjang pengkaderan bisa menjadi suatu modal dasar yang sangat penting bagi suatu organisasi.

Pengkaderan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang maupun kelompok yang termasuk di dalamnya peningkatan pengasahan teori dan ketrampilan, di dalam merumuskan segala macam persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Perkaderan merupakan suatu upaya sistematis untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), perorangan, kelompok dan juga kemampuan organisasi yang diperlukan untuk mengurus tugas dalam konteks kekinian dan juga untuk persiapan memasuki masa depan, serta Menanggulangi persoalan, juga dalam merumuskan suatu pola penanggulangan (resolusi) terhadap masalah yang timbul di dalamnya.

Untuk mencapai tujuan pengkaderan di lingkungan Partai Demokrat, maka partai ini merancang berbagai bentuk pelatihan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan, dan sikap kader partai, adapun pelaksanaan pengkaderan yang dirumuskan oleh Partai Demokrat seperti pada umumnya terpola dalam berbagai bentuk pengkaderan di dalam suatu organisasi yang bersifat regeneratif. Pemilihan model pengkaderan disesuaikan dengan ideologi partai itu sendiri yakni Nasionalis-Religius, berbagai bentuk pelatihan tersebut adalah:

a. Bentuk Perkaderan

1. Perkaderan Formal

Perkaderan formal adalah suatu bentuk perkaderan yang terstruktur, dan berjenjang mulai dari tingkat Dasar/Pemula, Cabang, Provinsi, sampai Pusat/Nasional. Yang dibekali dengan seperangkat pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan untuk membentuk sikap dan perilaku kader dalam mensosialisasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan Partai Demokrat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta Muhammad Muforis, di bawah ini :

“Dalam Perkaderan Formal yang dilakukan oleh Partai Demokrat memang belum terlalu baku seperti partai-partai politik yang telah lama berdiri, dikarenakan partai ini baru berumur sekitar 10 tahun maka bentuk pelatihan yang dilakukan masih bersifat tersentral yakni sering melakukan pertemuan di Cipanas sekaligus melakukan perkaderan yang bersifat formal dan evaluasi sebagai upaya untuk merumuskan bentuk perkaderan yang lebih baik ke depannya”.⁴³

Adapun pelaksanaan perkaderan formal yang dilakukan oleh Partai Demokrat menurut hasil wawancara seperti di atas baru bisa dilaksanakan mulai kader cabang, kader provinsi, sampai kader tingkat nasional. Bentuk perkaderan formal masih tersentral dan dilakukan di satu tempat (Cipanas), dan dibagi tiap tingkat.

⁴³ Wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dikantor DPD Partai Demokrat, Juli 2011 Pukul 14 : 15 WIB

Tabel 3.1
Perkaderan Formal Partai Demokrat
Yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 April 2008
Pelatihan Kader Pusat/Nasional

Sumber data : Dokumen DPD Partai Demokrasi D.I. Yogyakarta

Jam	Hari I	Hari II	Hari III	Hari IV
08.00 – 10.00	Pendaftaran ulang	Pendalaman Ideologi Partai	Studi Ke Nasionalisasi-an	Perumusan Strategi Partai
10.00 – 12.00	Pengkondisian peserta	Citra Diri Kader Nasional (Publik Speaking)	Pembangunan Kebudayaan dan Peradaban	Strategi Membangun Masa Depan P. Demokrat
13.15 – 15.15	Opening Ceremoni	Studi Religi/Keagamaan	Program Prioritas Pembangunan Kabinet Pemerintahan	Sistem Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
15.45 – 17.45	Pendalaman Kepartaian	Studi Demokrasi	Ekonomi, Politik, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara	Evaluasi, Refleksi, dan Rencana Tindak Lanjut
19.45 – 21.45	Pendalaman AD/ART	Studi Pembangunan Sosial Budaya di Indonesia	Lembaga-lembaga Tinggi dan Komisi Negara	Penutupan

Berikut adalah perkaderan yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang bertempat di Cipanas, acara ini dilaksanakan setelah perkaderan pada tingkat nasional telah dilakukan, yang diikuti oleh pengurus partai setingkat Cabang dan Provinsi dari seluruh Indonesia, termasuk pengurus Partai Demokrat dari DPD Yogyakarta.

Tabel 3.2
Perkaderan Formal Partai Demokrat
Yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 April 2008
Pelatihan Kader Provinsi

Jam	Hari I	Hari II	Hari III	Hari IV
08.00 – 10.00	-	Bedah AD/ART	Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi, dan DPD	Teknik Lobi, Aliansi dan Koalisi
10.00 – 12.00	Pendaftaran Ulang	Citra Diri Kader Nasional (Publik Speaking)	Program Prioritas Pembangunan Wilayah Propinsi Politik Anggaran	Resolusi Konflik
13.15 – 15.15	Opening ceremony	Teori-teori Modern Tentang Negara dan Masyarakat	Studi Demokrasi dan HAM	Manajemen Perencanaan Program Strategis
15.45 – 17.45	Bina Suasana dan Orientasi Pelatihan	Demokrasi dan Permasalahannya	Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi	Evaluasi, Refleksi, dan Rencana Tindak Lanjut
19.45 – 21.45	Sejarah dan Kelahiran Partai Demokrat	Peraturan Perundang-undangan tentang Parpol dan Pemilu	Implementasi Program Perjuangan Partai Demokrat	Penutupan

Sumber data : Dokumen DPD Partai Demokrasi D.I. Yogyakarta

Dari hasil penelitian di atas Partai Demokrat pertama kali melakukan perkaderan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Cabang dan sifatnya masih tersentral di Cipanas.

2. Perkaderan Non Formal

Perkaderan Non Formal adalah suatu bentuk perkaderan kader yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang, hanya bersifat pembinaan dan pengembangan ketrampilan, keahlian dan atau profesi anggota dan kader partai. Sebagai upaya

dalam peningkatan kualitas, pengembangan potensi anggota dan pengabdianya kepada bangsa dan negara serta menjaga akhlak sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Hal ini sebagai cerminan dari pengembangan sumber daya kader yang mempunyai kemampuan dalam berbagai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kenegaraan.

Tabel 3.3
Perkaderan Non Formal Partai Demokrat
Penyuluhan Partai Demokrat tentang Potensi Daerah kepada Masyarakat
Bantul, pada tanggal 15 – 17 Mei 2008

Jam	Hari I	Hari II	Hari III
08.00 – 10.00	-	Fungsi dan Peran Partai Politik	Wisata Ekonomi dan Wisata Politik
10.00 – 12.00	-	Demokrasi dan HAM	Pemerintahan dan Badan Perwakilan Desa/Kelurahan
13.15 – 15.15	Pembukaan	Sumber Daya Ekonomi Masyarakat Bantul	Merumuskan Tim Kerja
15.45 – 17.45	Bina Suasana dan Orientasi Penyuluhan	Peluang dan Kesempatan Kerja	Rencana Tindak Lanjut
19.45 – 21.45	Pengenalan Sistem Pemerintahan	Soft Skill	Penutupan

Sumber data : Dokumen DPD Partai Demokrasi D.I. Yogyakarta

Pada momen seperti di atas dilakukan suatu model pembinaan terhadap para kader pemula yang diberi tanggung jawab misal menggantikan pembicara yang berhalangan hadir dan setelah kegiatan tersebut selesai maka ada tindak lanjut terhadap masyarakat dengan membina mereka yang tentunya dimotori oleh kader partai itu sendiri.

Ragam ketrampilan yang menjadi sasaran dari Partai Demokrat hampir mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat diantaranya adalah: perkaderan bagi instruktur, perkaderan pemuda dan informasi, kewirausahaan dan koperasi, pemberdayaan buruh, pekerja, petani, nelayan, perkaderan motivator pada pengorganisasian masyarakat, perkaderan advokasi, legislasi dan pengembangan kesadaran hukum, manajemen dan administrasi pembangunan pemerintahan, perencanaan dan pengawasan anggaran dan belanja negara, dan lain-lain.

Namun dari beberapa ketrampilan yang diperuntukkan bagi kader seperti disebutkan di atas yang baru bisa dilakukan adalah perkaderan menjadi instruktur, kewirausahaan dan Koperasi, petani, nelayan, legislasi dan pengembangan kesadaran hukum, manajemen dan administrasi pembangunan pemerintahan, perencanaan dan pengawasan anggaran dan Belanja negara, walaupun belum bisa membuat wadah atau lembaga yang khusus untuk menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.

Di dalam perkaderan non formal kader dituntut untuk dapat siap kapan dan dimana saja ketika partai meminta dirinya untuk dapat mensukseskan agenda dari partai itu sendiri, semisal di dalam perkaderan non formal kader harus dapat menjadi pembicara apabila pembicara yang telah ditentukan berhalangan untuk hadir atau menjadi pendamping masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dibawah ini:

"Di dalam pelaksanaan perkaderan Non Formal tidak ada panduan yang baku dalam menjalankannya. Dalam pelaksanaannya perkaderan Non Formal disini melibatkan antara senior dan beberapa kader yang baru bergabung di partai, seperti pemberian tugas kepada kader yang baru bergabung diantaranya; menggantikan seniornya menjadi narasumber/pembicara dalam suatu acara seminar, memberdayakan buruh

atau petani di sebuah daerah, dan masih banyak yang lainnya. Kader-kader partai yang militan dan siap berkorban bagi partai biasanya merupakan output dari Pelatihan Non Formal ini".⁴⁴

Seperti hasil wawancara di atas, perkaderan Non Formal cukup efektif dalam upaya meningkatkan kemampuan kader itu sendiri dan perkaderan Non Formal disini memang tidak melibatkan secara keseluruhan kader partai. Berhasil atau tidaknya perkaderan Non Formal tersebut sebenarnya tergantung pada individu kader yang menjalani proses perkaderan tersebut. Bentuk perkaderan ini memang tidak terstruktur dan tidak berjenjang pula. Namun sebagai salah satu modal untuk mencetak kader yang mumpuni dalam sebuah partai maka partai juga seringkali mengintensifkan Pelatihan Non Formal ini sebagai upaya mencetak kader yang baik.

Dapatlah kita lihat dan simpulkan bahwa bentuk perkaderan Non Formal dari Partai Demokrat untuk para Kader Dasar/Pemula disini adalah sebagai berikut:

- a. Kader Dasar/Pemula diberikan tugas menggantikan seniornya yang berhalangan untuk hadir di dalam suatu agenda kegiatan partai dan kader Dasar/Pemula tersebut menjadi pembicara di sebuah agenda kegiatan.
- b. Kader Dasar/Pemula diberikan tanggungjawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat misalnya komunitas buruh, nelayan, petani dan lain sebagainya.

Dari penugasan yang telah diberikan tersebut, kader yang ditunjuk untuk menjalankannya diwajibkan memberikan laporan mengenai tugas yang telah

⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dikantor DPD Partai Demokrat, Juli 2011 Pukul 14 : 15 WIB

diberikan kepada mereka baik laporan secara lisan maupun tertulis. Dari hasil pelaporan inilah yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana perkembangan kader, apakah kader yang diberikan tugas benar-benar kader yang loyal ataukah hanya sebagai kader yang mengejar jabatan politik saja.

3. Perkaderan Informal

Perkaderan Informal adalah suatu model atau bentuk perkaderan yang mengutamakan peran serta secara aktif anggota/kader pada setiap kegiatan partai, guna mengembangkan diri dan mengimplementasikan hasil dari pelatihan formal maupun non formal di lingkungan partai. Hal ini juga termasuk dalam bentuk kepanitiaan, delegasi kader atau tim yang telah ditetapkan oleh partai. Bentuk perkaderan informal seperti panitia perkaderan formal, perkaderan nonformal, perkaderan ketrampilan, panitia peringatan ulang tahun partai, panitia hari besar agama dan hari besar nasional, seminar, lokakarya, tim penanggulangan bencana alam dan sebagainya.

Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Muforis Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, tentang pelatihan informal:

"Perkaderan informal disini seperti kepanitiaan hari-hari besar agama, hari-hari besar bagi partai, dan hari-hari besar nasional. Perkaderan informal disini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kekompakan antara kader-kader partai dan dengan seringnya mereka bekerja dalam kelompok atau tim tersebut maka, akan menjadi sebuah modal dasar di dalam kepemimpinan partai selanjutnya".⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dikantor DPD Partai Demokrat, Juli 2011 Pukul 14 : 15 WIB

Dari hasil wawancara tersebut diatas, perkaderan informal memang sangat sering dilakukan dilingkungan partai. Perkaderan informal sesungguhnya tidak terlepas dari agenda bidang-bidang didalam struktur kepengurusan Partai Demokrat itu sendiri. Perkaderan informal seperti menjadi panitia untuk hari raya Idhul Qurban yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat DIY sejak tahun 2005 sampai Idhul Adha tahun 2011, panitia kampanye pemilu DIY tahun 2004 dan 2009, panitia rapat/musyawarah daerah yang diadakan pada tahun 2003, 2006 dan 2011 bertempat di Wisma Kaliurang yang membahas beberapa hal yakni:

- a. Menyusun Program Kerja Partai Tingkat Daerah.
- b. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Memilih Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya dalam balas kewenangannya.⁴⁶

Perkaderan informal kalau kita lihat memang sangat sering dilakukan di lingkungan partai. Akan tetapi perkaderan informal disini kurang mempunyai kekuatan dalam membentuk seorang kader untuk menjadi seseorang kader yang telah mumpuni di dalam tubuh partai. Kader yang mempunyai kapabilitas bagi sebuah partai memang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan sebuah partai politik. Walaupun perkaderan informal tidak terlalu mempunyai daya untuk membentuk kader yang baik, namun sumbangsih riil dari sebuah perkaderan informal dapat dirasakan oleh setiap kader dalam konteks membentuk kekompakan sebuah tim. Serta mempererat rasa kebersamaan dan kekeluargaan di dalam sebuah partai politik.

⁴⁶ AD/ART Partai Demokrat, Hasil-Hasil Kongres Partai Demokrat (revisi) DPD DIY, hal 23.

Untuk dapat menjalankan roda kepengurusan partai, perkaderan informal memang cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah unit kepanitiaan, yang mana kader dituntut untuk dapat berperan secara aktif didalamnya dan kader tersebut juga untuk dapat membaaur dengan kader yang lainnya untuk dapat bekerjasama. Unit kerja bagaikan sebuah kesatuan yang utuh yang apabila ada salah satu bagian yang tidak berfungsi maksimal maka dapatlah dipastikan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Hal inilah yang kemudian dipandang sebagai suatu hal yang cukup penting ketika suatu organisasi partai hendak menciptakan suatu tingkat kesolidan yang paripurna bagi kader-kadernya.

b. Jenjang dan Tujuan Perkaderan

1. Jenjang Perkaderan

Jenjang perkaderan adalah suatu tahapan yang diterapkan dalam perkaderan formal, ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta perkaderan yang dikaitkan dengan keluasan dan kedalaman materi dari perkaderan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan perkaderan dari partai itu sendiri, diharapkan dari berjenjangnya perkaderan atau perkaderan maka tingkat militansi, dan kecakapan kader makin meningkat pula. Untuk itulah maka perlulah ditempuh jenjang perkaderan sebagai berikut:

a. Perkaderan Dasar/Pemula

Merupakan pendidikan kader yang dilakukan dalam bentuk perkaderan kepemimpinan tingkat Dasar/Pemula bagi kader dan/atau fungsionaris partai yang berada pada tingkat Pedesaan, Kelurahan atau Kecamatan. Perkaderan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang Partai

Demokrat, dengan bantuan supervisi, koordinasi dan konsultasi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

b. Perkaderan Cabang

Merupakan pendidikan kader yang dilakukan dalam bentuk perkaderan kepemimpinan tingkat Cabang bagi kader dan/atau fungsionaris partai yang pernah mengikuti perkaderan di tingkat Dasar/Pemula. Perkaderan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, dengan bantuan supervisi, koordinasi, dan konsultasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

c. Perkaderan Provinsi

Merupakan pendidikan kader yang dilakukan dalam bentuk perkaderan kepemimpinan tingkat provinsi bagi kader dan/atau fungsionaris partai yang pernah mengikuti perkaderan Dasar/Pemula, perkaderan Cabang. Perkaderan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat itu sendiri.

d. Perkaderan Nasional

Merupakan pendidikan kader yang dilakukan dalam bentuk perkaderan kepemimpinan tingkat nasional bagi kader dan/atau fungsionaris partai yang pernah mengikuti perkaderan di tingkat Provinsi. Perkaderan ini ditujukan bagi fungsionaris partai di tingkat nasional namun bisa juga diikuti oleh kader di tingkat provinsi. Perkaderan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan

Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu sendiri.

2. Tujuan Perkaderan

Secara umum, tujuan perkaderan dari Partai Demokrat adalah memfasilitasi terciptanya kader bangsa yang religius, memiliki wawasan yang luas, semangat nasionalisme yang tinggi, semangat pembaharuan yang berorientasi masa depan, serta memiliki ketrampilan kepemimpinan dan daya juang yang tangguh sehingga mampu memperjuangkan cita-cita politik dan program perjuangan partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta mampu memberikan jaminan bagi pembangunan nasional Berkelanjutan.⁴⁷

Adapun secara khusus, tujuan perkaderan berdasarkan masing-masing jenjangnya adalah sebagai berikut:

1. Perkaderan Dasar/Pemula

- a. Kader mengetahui dan memahami garis besar sejarah kelahiran, jati diri, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat
- b. Kader menyadari, menghayati, dan memperbaharui niat untuk melaksanakan aktivitas berpartai sebagai bagian dari sikap nasionalisme.
- c. Kader mengetahui sistem dan struktur Pemerintahan dan Badan Perwakilan Desa/Kelurahan atau sebutan lain sejenis dan program prioritasnya serta mampu berperan serta dalam proses pembangunan

⁴⁷ Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi: Partai Demokrat*, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.

masyarakat Desa/Kelurahan, dengan pemahaman dari perspektif Nasionalis-Religius dan keadilan sosial-ekonomi.

- d. Kader memahami dan mampu menerapkan metode dan teknik membangun tim kerja, cara pengambilan keputusan, metode pemecahan masalah dan metode diskusi dan persidangan.
- e. Terumuskan rencana program/kegiatan yang disusun dan disepakati seluruh peserta untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut pasca perkaderan dasar.

2. Perkaderan Cabang

- a. Kader mengetahui dan memahami secara lebih baik dan mendalam sejarah kelahiran, jati diri, strategi kebijakan dan program perjuangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
- b. Kader menyadari, menghayati, dan memperbaharui niat bahwa aktivitas berpartai, selain sebagai kewajiban sebagai warga negara juga merupakan hak yang harus diberikan oleh negara kepada setiap warganya.
- c. Kader mengetahui sistem dan struktur pemerintahan Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan program prioritas Kecamatan, Kabupaten/Kota serta mampu menganalisis secara kritis dampak positif dan negatif dari penerapan dalam konteks otonomi daerah serta perspektif Pancasila dan pembangunan berkelanjutan.
- d. Kader memahami dan mampu menerapkan dasar-dasar metode dan teknik advokasi, legislasi, yudikasi, dan lobi, analisis sosial,

sistem informasi/komunikasi dan jaringan, metode dan teknik penggalangan massa dan perencanaan strategis.

- e. Seluruh kader mampu merumuskan program/kegiatan yang disusun dan disepakati bersama untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut pasca perkaderan formal.

3. Perkaderan Provinsi

- a. Kader memahami dan menghayati serta termotivasi untuk melaksanakan program perjuangan Partai demokrat itu sendiri
- b. Kader mampu memahami pandangan partai dan ideologi tentang hak asasi manusia dan demokrasi serta dapat menjelaskan berbagai kendala tentang penerapan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Hal ini tentu saja sesuai dengan konteks peraturan perundang-undangan tentang partai politik dan pemilu.
- c. Kader mengetahui modern tentang teori modern tentang konsep negara dan masyarakat serta mampu memahami konsep/pemikiran tentang liberalisme, sosialisme, kapitalisme, fasaisme, dan terorisme.
- d. Kader mengetahui prioritas program Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan mampu menganalisis secara cermat dampak positif atau negatif dari penerapan program tersebut dalam proses pembangunan wilayah.
- e. Kader menguasai dasar-dasar kepemimpinan, membangun aliansi dan koalisi, manajemen perencanaan program kegiatan dan alternatif Penyelesaian sengketa.

- f. Terumuskannya rencana program kegiatan yang disusun dan disepakati seluruh kader untuk dilaksanakan sebagai program tindak lanjut pasca perkaderan formal.

4. Perkaderan Nasional/Pusat

- a. Kader dapat secara kritis, arif dan mampu mencermati proses hasil pembangunan nasional di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, dan politik pada masa orde lama, orde baru masa reformasi dan bahkan pasca reformasi.
- b. Kader mengetahui dan bila perlu mengkritisi kebijakan program prioritas pembangunan pada kabinet pemerintahan yang sedang berjalan dan implikasi dari penerapan program tersebut.
- c. Kader memahami dan menghayati visi dan misi dari Partai Demokrat, serta mampu merumuskan strategi operasional perjuangan partai dalam konteks kebangsaan pembangunan dan mengembangkan nuansa nasionalis-religius.
- d. Kader mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Partai demokrat dalam kehidupan politik saat ini dan memahami strategi perjuangan partai dalam program penyuksesan pemilu.
- e. Terumuskannya rencana program kegiatan yang disusun dan disepakati oleh seluruh kader untuk dapat dilaksanakan sebagai proses tindak lanjut pasca pelatihan.

Sistem berjenjang perkaderan Partai Demokrat merupakan upaya totalitas untuk menyiapkan kader yang terdiri dari komponen-komponen yang saling

berinteraksi dan saling mempengaruhi. Adapun tujuan dari perkaderan terhadap kader partai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan kader dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berkepribadian religius. Bersikap terbuka dalam hal pemikiran terhadap pengambilan keputusan politik dan kebijakan partai.
- b. Menumbuhkan sikap kader untuk tetap berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 serta memiliki jiwa patriotik yang merupakan hak dan kewajiban warga negara.
- c. Meningkatkan kualitas wawasan kader dalam memahami filosofi dan strategi perjuangan Partai Demokrat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader dalam mengelola dan mengembangkan partai secara berkesinambungan, sebagai upaya meningkatkan kualitas kader partai untuk peduli dalam menyerap, menyalurkan dan membela aspirasi rakyat dalam menjalankan program-program partai.
- e. Membentuk kepribadian kader yang matang dan dewasa, memiliki jiwa pemimpin, mempunyai idealisme yang tinggi, mampu sebagai pemersatu, bersikap pembaharu, memiliki kemandirian dan disiplin, berjiwa demokratis, berorientasi kerakyatan, dan bervisi ke masa depan.⁴⁸

⁴⁸ Ibid

3. Metode Perkaderan

Metode perkaderan merupakan cara-cara tertentu mengenai penyajian materi perkaderan dalam kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyajian materi perkaderan sangatlah ditentukan oleh kemampuan kreatifitas dan kemampuan para nara sumber dan pelatih atau instruktur dalam menerapkan metode perkaderan, sehingga mampu membantu para peserta dalam mencerna materi yang disampaikan dalam perkaderan tersebut.

Metode perkaderan senantiasa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan peserta. Kebutuhan akan selalu adanya inovasi berorientasi pada pencapaian efektivitas dan efisiensi terhadap penguasaan materi. Penguasaan materi bukan hanya menjadi kewajiban bagi narasumber, namun instruktur dan para peserta pula diharapkan menguasai materi. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk perubahan sikap dan perilaku peserta sebagaimana tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pelatihan. Jadi di dalam pelaksanaan suatu pelatihan yang berkader bukan hanya peserta, namun semua komponen yang terlibat didalamnya yakni, narasumber, instruktur, panitia penyelenggara dan para peserta.

Berikut berbagai metode perkaderan yang dapat diterapkan dan dikembangkan di dalam pelatihan kader, diantaranya adalah:

a. Ceramah

Metode ini dimaksudkan sebagai metode penyajian informasi yang bersifat satu arah (monolog), yakni dari narasumber (penceramah) kepada para peserta.

Agar proses penyajian informasi dapat berlangsung lebih menarik dan efektif, maka perlu dilengkapi dengan alat peraga. Di dalam penerapan metode ini sangatlah monoton, artinya dialog yang terjadi di dalam forum pelatihan hanya atau arah saja.

Metode ceramah merupakan penyajian materi yang disampaikan kepada peserta dengan uraian dan penjelasan dari instruktur. Adapun tujuan dari metode ceramah itu sendiri adalah menyampaikan materi yang bersifat tetap seperti materi tentang konstitusi (AD/ART) organisasi, ideologi organisasi dan lain sebagainya kepada para peserta/audience, serta dapat meningkatkan daya pendengaran para audience.

Dalam penerapan metode perkaderan dengan ceramah ada kelemahan yang terkandung didalamnya, kelemahannya antara lain; peserta/audience dapat mudah sekali bosan, peserta kurang aktif, tidak adanya umpan balik dari peserta kepada narasumber, sehingga hal ini dapat berdampak pada pencapaian target perkaderan. Untuk dapat meminimalisir kelemahan yang ada maka dapat ditempuh dengan cara; pelatih, memberikan kesempatan kepada para peserta untuk dapat mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan.

b. Diskusi

Merupakan suatu metode perkaderan yang memfokuskan kepada para peserta perkaderan untuk dapat melakukan pertukaran pengetahuan, gagasan, dan pendapat secara bebas dengan sesama peserta. Dengan membahas suatu topik tertentu guna mendapat kesamaan pemikiran. Metode dipergunakan untuk dapat

menumbuhkan ketrampilan mendengarkan, berpendapat, etika forum, serta bagaimana berargumentasi yang baik di dalam forum.

Dalam metode diskusi para peserta perkaderan diwajibkan untuk dapat saling mengeluarkan gagasan, pengalaman tentang masalah yang sedang dibahas. Adapun tujuan dari metode pelatihan diskusi adalah; agar meningkatkan kemampuan berpartisipasi secara aktif, memantapkan teori-teori yang sudah ada yang diperoleh dari narasumber. Menambah skill untuk penanganan dan pemecahan suatu masalah.

Adapun kelemahan dari penerapan metode ini adalah; membutuhkan waktu yang relatif cukup lama, materi dapat berkembang dan bahkan melenceng dari fokus pembahasan, diskusi yang terjadi biasanya menjadi tidak terarah dan bahkan tidak menemukan kesimpulan, adanya dominasi dari salah satu peserta di dalam satu kelompok diskusi. Cara untuk menghindari hal-hal seperti itu adalah; instruktur menyiapkan materi yang akan didiskusikan dan harus membuat garis besar dari topik yang akan dibahas. Diadakan pemilihan moderator bagi tiap-tiap kelompok untuk dapat mengarahkan diskusi yang dilaksanakan.

c. Brainstorming (Curah Pendapat)

Merupakan metode perkaderan yang melibatkan narasumber dengan peserta training. Atau peserta dengan instruktur perkaderan, maupun ketiga komponen tersebut yakni narasumber, instruktur dan peserta. Kemasannya dari model perkaderan ini adalah para peserta diminta untuk mengeluarkan tanggapan, pendapat, ide, dan saran secara bebas dan spontan tentang suatu persoalan, tanpa

disertai dengan penilaian benar-salah atau baik-buruk terhadap pemikiran yang dikemukakannya itu oleh narasumber maupun instruktur dalam penilaian.

d. Mentaplan

Adalah suatu metode dalam perkaderan yang lebih banyak menggunakan media/alat peraga untuk melihat sejauh mana kapasitas pengetahuan dari para peserta. Hal ini untuk meminimalisir dominasi yang timbul diantara para peserta yang mencoba untuk aktualisasi diri. Di dalam suatu forum diskusi, kadangkadangkang ada dominasi peserta yang satu terhadap yang lain, dan akhirnya peserta yang lainnya hanya sekedar sebagai pendengar saja. Mentaplan dilakukan untuk menggali sebanyak mungkin ide peserta secara tertulis, yang dengan menggunakan papan panel atau lembaran kertas untuk merumuskan secara tertulis kontribusi dari masing-masing pemikiran para peserta.

Setelah tertuang di dalam tulisan kemudian diklasifikasikan menurut aspek-aspek kelompok permasalahan yang ada, dan kemudian dirumuskan menjadi bahan diskusi kembali di dalam suatu forum yang melibatkan seluruh peserta perkaderan, hal ini dimaksudkan dalam rangka mempercepat perumusan kesimpulan.

e. Studi Kasus

Dalam metode ini instruktur menyampaikan bahan materi dengan menyuguhkan kasus yang diambil dari pengalaman kepada peserta untuk didiskusikan. Adapun tujuan dari metode ini adalah merangsang peserta untuk berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari. Sedangkan manfaat dari metode ini yaitu: peserta dapat meningkatkan keterampilan dalam hal menganalisa dan mencari jalan keluar dari masalah, memantapkan teori dengan mengkaitkannya dengan kenyataan (adanya uji teori), serta dapat pula meningkatkan partisipasi peserta training di dalam suatu perkaderan. Keuntungan dari penggunaan metode ini adalah mengajak peserta untuk selalu menganalisa masalah yang dihadapi, mengajak peserta ke hal-hal yang mendekati kenyataan, semua peserta dapat aktif (dalam kelompok kecil).

Sedangkan kelemahan dari metode ini yaitu; sulit memberi semua data yang diperlukan, juga bisa jadi ada peserta yang belum pernah menghadapi kasus serupa sehingga merasa kurang dapat menyumbang gagasan, tidak semua kasus dapat dipakai untuk bahan diskusi, model ini juga dapat memakan waktu yang cukup lama.

f. Penugasan

Peserta diminta untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dengan cara-cara tertentu, yang memberikan peluang baginya untuk mengembangkan kreativitas, ide dan gagasan inovatif. Metode penugasan ini dapat berbentuk pembuatan ikhtisar (resume) sebuah buku atau makalah, membuat laporan hasil pengamatan, membuat makalah, dan lain sebagainya.

g. Role Playing (Bermain Peran)

Peserta melakukan suatu kegiatan memainkan peran tentang seseorang atau kelompok seperti yang sesungguhnya telah atau akan terjadi/dialami dalam kehidupan nyata, untuk kemudian dianalisis segi-segi positif dan negatif yang

dapat dipetik darinya. Peran yang dimainkan lebih ditekankan pada peran tugas yang dijalankan seseorang atau kelompok, bukan peran personifikasinya.

Keuntungan dari penerapan metode Role Playing adalah semua atau sebagian besar peserta dapat ikut secara proaktif, suasana kelas/ruang forum dapat hidup, memperoleh bahan diskusi langsung dari sesuatu yang baru saja dialami, dapat dipakai untuk memperjelas berbagai bahan diskusi seperti: pertama menganalisa masalah, kedua menemukan dan mencoba penyelesaian masalah, ketiga menambah keterampilan berdiskusi seperti main peran peserta diskusi yang memonopoli diskusi yang menghambat diskusi.

Sedangkan kelemahan dari penerapan metode Role Playing adalah; kadang-kadang peserta kurang mampu membawakan perannya dengan meyakinkan, sulit merelasikan peran dengan kenyataan, instruktur hams mantap dalam pembahasan masalah, padahal hal ini cukup sulit dilakukan, terutama dalam mengkaitkan kasus yang muncul dengan konsep yang dibawakan.

h. Simulasi

Metode ini dipergunakan untuk menciptakan suasana tertentu dari kenyataan hidup yang sesungguhnya dalam bentuk permainan yang dilakukan oleh peserta melalui instrumen-instrumen yang telah dipersiapkan. Permainan ini hendaknya mampu menumbuhkan kesadaran diri, rasa simpati, kepekaan dan perubahan sikap, serta mampu meningkatkan pengetahuan sikap, dan ketrampilan dalam hal komunikasi, kerjasama, kreativitas, dan tanggungjawab.

i. Kunjungan Lapangan

Peserta mengunjungi suatu obyek kegiatan tertentu di lapangan untuk diamati, dipelajari, dan dikaji guna memperkaya wawasan dan mengembangkan sikap. Berbagai metode sebagaimana diuraikan diatas diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip belajar bagi orang dewasa dan dalam penggunaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta serta keberadaan media penunjangnya.

Manfaat dari perkaderan ini adalah; dapat menambah gairah peserta perkaderan dalam menganalisa dan menanggapi ketimpangan sosial yang sedang terjadi di masyarakat, dapat memantapkan teori dengan mengkaitkannya pada kenyataan. Mengingat perkaderan di lingkungan Partai Demokrat menganut prinsip-prinsip pendidikan bagi orang dewasa (andragogi) dengan pendekatan humanistik dan partisipatif, maka apapun pilihan metode yang ditetapkan oleh para narasumber dan pelatih dalam menyampaikan materi pelatihan, memang diorientasikan pada pelibatan peran aktif para peserta dalam proses pembahasan materi guna mencapai puncak efektivitas pencapaian tujuan pelatihan yang maksimal.

4. Pendekatan Perkaderan

Untuk mencapai tujuan dari perkaderan di dalam tubuh Partai Demokrat, maka perhatian yang lebih terhadap proses dan metode yang digunakan dalam perkaderan harus sesuai dengan prinsip-prinsip belajar bagi orang dewasa. Adapun Pendekatan perkaderan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Humanistik

Pendekatan Humanistik merupakan sintesa dari pendekatan paedagogi dan andragogi, yang mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Sumber belajar adalah perpaduan antara pengetahuan dan pengalaman narasumber, pelatih, dan peserta sendiri. Pelatih membantu merangkum dan menyimpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman tersebut. Oleh karena itu, orientasi belajar lebih ditekankan pada proses pelatihan.
2. Materi perkaderan diputuskan bersama oleh peserta dan pelatih. Pelatih membantu menentukan urutan penyajian dan menempatkannya dalam sekuensi proses pelatihan sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan tujuan pelatihan.
3. Belajar dipandang sebagai pemecahan masalah (problem solving) dengan membulatkan pengetahuan serta pengalaman dari sejumlah informasi yang disajikan oleh peserta, pelatih, dan narasumber. Dengan demikian, pelatihan merupakan proses penemuan dan pemecahan masalah, sekaligus merupakan proses transfer dan transformasi pengetahuan dan pengalaman.

b. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan perkaderan yang mengacu pada proses belajar aktif dari seluruh peserta dan unsur lain yang terlibat dalam proses pelatihan diarahkan pada upaya membantu peserta, agar terlatih dalam rangka mengembangkan potensi yang dimilikinya. Perkaderan merupakan laboratorium kegiatan pendidikan, sehingga informasi dan peristiwa yang

ditangkap akan direfleksikan kembali oleh peserta untuk diproses menjadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan.

Prinsip-prinsip belajar orang dewasa mencakupi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Konsep diri

Salah satu perbedaan utama antara anak-anak dan orang dewasa dalam belajar adalah bahwa anak-anak masih merasa diri mereka sebagai *dependent*, yaitu tergantung pada orang tua dan guru. Sebaliknya orang dewasa akan merasa tersinggung apabila diperlakukan sebagai "murid" dengan cara yang kurang menghargai, merendahkan, atau cara lain yang menyamakan mereka seperti anak-anak. Dengan demikian, seorang pelatih orang dewasa harus lebih bertindak sebagai "fasilitator" daripada sebagai "guru".

2. Pengalaman

Orang-orang dewasa telah mengumpulkan pengalaman yang cukup banyak dalam hidup mereka, baik dari pekerjaan maupun dari kegiatan lain. Dengan demikian mereka juga mampu menentukan apa yang harus diajarkan dan dalam bentuk atau format seperti apa.

3. Kesiapan untuk belajar

Dalam pendidikan anak-anak, guru atau sekolah menentukan apa yang harus diajarkan pada murid baik dalam hal isi maupun urutannya. Dalam kasus orang dewasa, mereka juga dapat memilih apa yang masih mereka butuhkan dan bagaimana seharusnya urutan belajarnya. Dalam situasi ini, pelatih harus

memposisikan dirinya sebagai "nara sumber" yang membantu peserta dewasa untuk melakukan diagnosa kebutuhan mereka sendiri.

4. Perspektif waktu

Dalam pendidikan anak, murid diharapkan untuk dapat menyimpan "informasi" sebanyak mungkin yang akan digunakan "pada suatu hari nanti " yang mungkin dua belas sampai lima belas tahun lagi. Sebaliknya, orang dewasa lebih tertarik untuk memperoleh hal-hal baru yang bisa diterapkan segera, baik untuk memecahkan masalah maupun untuk meningkatkan kinerja sendiri.

5. Media Perkaderan

Kelancaran proses perkaderan juga ditentukan oleh pilihan penggunaan media, alat peraga atau alat bantu. Ketepatan penggunaan media amat mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan metode penyampaian materi. Media perkaderan atau terkadang juga disebut alat bantu, alat peraga, atau sarana pelatihan yang umumnya digunakan antara lain: papan tulis, kertas tulis, lembar bergambar, overhead projector, dan lain sebagainya- Pada hakekatnya, setiap benda atau barang yang dimanfaatkan guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar dalam perkaderan.

Bagi seorang instruktur, hendaknya yakin bahwa dirinya mampu dan cukup menguasai penggunaan media, khususnya jika media tersebut digunakan untuk pertama kalinya. Agar selalu diingat, penggunaan media juga dimaksudkan sebagai alat bantu guna mengembangkan partisipasi peserta pelatihan. Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi pelatih dalam memilih media perkaderan yang akan digunakan, antara lain:

- a. Situasi: untuk siapa media itu digunakan, untuk orang per orang, kelompok atau seluruh peserta? Di mana media itu akan digunakan, di ruang kelas?
- b. Materi bahasan dan pengaruh yang diinginkan: emosi peserta seperti apa yang diharapkan pelatih untuk dibangkitkan, apakah rasa takjub, heran, rasa simpati atau lainnya.
- c. Ketersediaan sumberdaya; apakah penggunaan media tersebut memerlukan prasyarat tertentu, seperti adanya arus listrik dan peralatan penunjang lainnya? Apakah tersedia biaya/dana yang cukup untuk pengadaan dan penggandaan media tersebut?

Media sebagai alat bantu dalam proses perkaderan sangat penting untuk menunjang kelancaran pelatihan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk ini, sebelum melaksanakan perkaderan, merencanakan terlebih dahulu persiapan dan kelengkapan media yang diperlukan.⁴⁹

Media yang dipergunakan dalam proses perkaderan kader hendaknya dimaksudkan untuk menunjang kelancaran proses komunikasi antar sesama peserta, narasumber dan instruktur, yang berorientasi pada pencapaian tujuan perkaderan. Media perkaderan yang hendak digunakan dapat berbentuk perangkat keras maupun perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perkaderan, antara lain; papan tulis, flipchart, kursi dan meja, poster dan komik serta fotonovella, spidol dan alat tulis, kertas tulis dengan berbagai ukuran, alat-alat pemutaran film dan lain-lain.

⁴⁹ Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi: Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.*

6. Jadwal Perkaderan

Bertolak dari rumusan materi perkaderan dan lamanya waktu pembahasan yang telah ditentukan, serta dengan asumsi bahwa perkaderan pada masing-masing jenjang diselenggarakan secara residential (seluruh peserta tinggal berasmara dan menginap di lokasi perkaderan). Hal ini membutuhkan perumusan waktu yang sesuai dan cukup efisien untuk keefektifan pelaksanaan perkaderan. Manajemen waktu atau penjadwalan yang dilakukan sebagai upaya agar training | dapat terarah dan sesuai dengan tujuan diadakannya perkaderan di tubuh Partai Demokrat itu sendiri.

7. Peserta

Pada dasarnya pencarian, pemilihan, dan penetapan calon-calon peserta dilakukan secara selektif. Mereka yang akan mengikuti perkaderan pada jenjang tertentu yang diutamakan fungsionaris Partai atau kader yang telah mengikuti jenjang pelatihan setingkat di bawahnya. Secara umum, kualifikasi calon peserta perkaderan pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur serendah-rendahnya 19 tahun atau sudah menikah.
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S 1) atau sederajat.
- d. Memiliki motivasi dan kepedulian yang tinggi untuk mengembangkan partai.
- e. Mendapatkan legalitas dari Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- f. Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan hingga selesai.

- g. Mengisi dan mengembalikan formulir isian bagi calon peserta yang disediakan panitia penyelenggara pada waktu yang telah ditetapkan.

Jumlah ideal peserta pada setiap jenjang perkaderan adalah berkisar 25-30 orang, dan maksimal adalah 40 orang. Apabila pada setiap pelaksanaan perkaderan terdapat calon peserta lebih dari jumlah maksimal, maka pelaksanaan perkaderan dapat dilakukan secara bergelombang, atau angkatan demi angkatan.⁵⁰

8. Instruktur

Untuk menjadi seorang instruktur di Partai Demokrat harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di tingkatan partai. Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, tentang kualifikasi Instruktur:

"Untuk menjadi seorang Instruktur di perkaderan formal partai adalah kader tersebut harus mengikuti dan lulus perkaderan TOT (Training Of Trainer) terlebih dahulu dan untuk menjadi seorang instruktur di tingkat Nasional harus lulus Perkaderan Pusat dan minimal lulus S1, begitu juga untuk perkaderan yang lain seperti, perkaderan tingkat Provinsi, Cabang dan bahkan tingkat Dasar/Pemula"⁵¹

Seseorang yang dapat berperan sebagai perkaderan adalah mereka yang

memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Kader Partai yang berpengalaman di bidang pendidikan dan perkaderan.
- b. Menguasai Sistem perkaderan Partai Demokrat
- c. Memahami filosofi pendidikan bagi orang dewasa dan menguasai penerapan pendekatan perkaderan partisipatif.

⁵⁰ Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi: Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.*

⁵¹ Wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dikantor DPD Partai Demokrat, Juli 2011 Pukul 14 : 15 WIB

- d. Memahami dan menghayati fungsi-fungsi sebagai instruktur.
- e. Mendapatkan legalitas dari (direkomendasikan oleh) Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Ketentuan tentang jumlah instruktur pada setiap perkaderan dapat disesuaikan dengan jumlah peserta. Sebaiknya untuk setiap pelatihan diterapkan antara 3-5 instruktur yang terkoordinasi dalam sebuah tim.

Sebelum memasuki arena perkaderan, tugas utama para instruktur adalah menyamakan visi dan persepsi sesama pelatih dan antara pelatih dengan Dewan Pimpinan Partai sebagai penanggung jawab perkaderan tentang berbagai hal yang hendak dilakukan selama proses perkaderan berlangsung, dengan berpedoman pada Sistem Perkaderan Partai Demokrat Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan oleh instruktur adalah antara lain:

1. Memandu dan mengantarkan acara.
2. Menyiapkan bahan materi perkaderan.
3. Menggantikan narasumber apabila berhalangan.
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi.
5. Memberikan bimbingan kepada peserta.
6. Mengendalikan jalannya perkaderan.⁵²

Guna kelancaran proses perkaderan, perlu ditetapkan Koordinator Tim Instruktur di antara para instruktur. Perlu juga pembagian tugas pada tim instruktur ini, siapa yang harus menangani pencatatan proses dan hasil pembahasan materi, menggantikan narasumber yang mendadak berhalangan hadir

⁵² Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi: Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.*

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelancaran proses penyampaian materi pada setiap sesi.

Adanya buku catatan khusus tim instruktur yang mencatat dan merekam perkembangan proses perkaderan amat diperlukan. Buku tersebut merupakan alat komunikasi bagi anggota tim pelatih yang tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian proses berlangsungnya perkaderan dan kelak akan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam melakukan evaluasi perkaderan.

9. Narasumber

Untuk menjadi narasumber dalam Perkaderan Formal di Partai Demokrat bukan hanya di kalangan internal partai saja, tetapi bisa saja memanggil dari luar partai. Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Divisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, tentang narasumber:

“Sedangkan untuk menjadi seorang narasumber di dalam Perkaderan Formal adalah kalau dari luar partai adalah dari akademisi, pakar dan ahli dibidangnya. Sedangkan dari Internal Partai adalah jajaran pejabat teras harian partai”⁵³

Dari hasil wawancara diatas dikatakan untuk menjadi seorang narasumber dalam Perkaderan Formal bukan hanya dari kalangan internal partai saja, tetapi bisa juga dari kalangan luar partai yang memahami mengenai materi pelatihan.

Seseorang yang ditetapkan sebagai narasumber dalam perkaderan di lingkungan Partai Demokrat tidak harus merupakan seorang pimpinan, kader, atau

⁵³ Wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Divisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dikantor DPD Partai Demokrat, Juli 2011 Pukul 14 : 15 WIB

anggota Partai. Siapapun dapat menjadi narasumber, sejauh memenuhi syarat minimal dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pakar dan ahli yang menguasai bidang materi yang akan disampaikan.
- b. Sanggup menyiapkan makalah atau pokok-pokok pikirannya secara tertulis.
- c. Bersedia berdialog dengan peserta mengenai substansi materi yang disampaikan.
- d. Mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Jumlah narasumber disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah materi yang akan diberikan pada setiap jenjang perkaderan. Seseorang narasumber dapat menyampaikan lebih dari satu materi perkaderan berdasarkan kebutuhan dan kondisi tertentu.

10. Kepanitiaan

Komponen kepanitiaan perkaderan kader yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab yaitu Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- b. Panitia Pengarah yaitu seluruh anggota Tim Instruktur dan unsur pimpinan atau anggota Partai yang dipilih dan ditetapkan Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- c. Panitia Pelaksanaan yaitu unsur pimpinan atau anggota Partai yang dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Jumlah personalia masing-masing komponen dalam kepanitiaan perkaderan adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab: berjumlah satu orang, yaitu Ketua Umum pada Dewan Pimpinan Pusat, atau Ketua pada Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang.
2. Panitia Pengarah: berjumlah antara 3-7 orang, terdiri atas seseorang Koordinator merangkap anggota dan anggota-anggota lain.
3. Panitia Pelaksana: dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan, minimal terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan dua orang Pembantu Umum atau seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Tugas yang harus dijalankan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dalam mempersiapkan dan melaksanakan perkaderan adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah

Panitia pengarah merupakan panitia yang secara umumnya bertugas dalam menyiapkan konsep dari pelatihan yang akan digunakan sebagai kerangka dalam pelaksanaan perkaderan, berikut rincian dari tugas panitia pengarah:

1. Menyiapkan kerangka acuan kegiatan perkaderan.
2. Melakukan seleksi terhadap calon peserta.
3. Merancang dan mempersiapkan segala macam kebutuhan perkaderan, antara lain: rancangan jadwal acara, rangkaian tata-tertib, media perkaderan yang secara khusus akan digunakan dan instrumen atau alat evaluasi perkaderan.

4. Memberi arahan dan pertimbangan kepada Panitia Pelaksana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan.
5. Bertanggung jawab dan melaporkan secara tertulis mengenai proses dan hasil pelatihan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

b. Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana adalah panitia yang bertugas sebagai pelaksana lapangan dari konsep yang telah dirumuskan oleh panitia pengarah, adapun tugas dari panitia pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan pembagian kerja panitia.
2. Menyiapkan dan menyusun anggaran biaya perkaderan.
3. Menyebarkan undangan kepada calon-calon peserta.
4. Menghubungi dan meminta kesediaan para calon narasumber.
5. Menyediakan segala perlengkapan yang diperlukan.
6. Menyiapkan dan menata ruangan perkaderan dan kelengkapannya.
7. Mendokumentasikan arsip dan data yang berkaitan dengan kegiatan perkaderan.
8. Menyebarkan informasi dan publikasi yang diperlukan.
9. Menggandakan bahan-bahan perkaderan yang telah ditentukan Tim Instruktur.
10. Menyelenggarakan acara pembukaan dan penutupan kegiatan perkaderan secara resmi.
11. Menjaga keterlibatan dan keamanan selama perkaderan berlangsung.

12. Bertanggung jawab dan melaporkan secara tertulis teknis penyelenggaraan perkaderan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.⁵⁴

Di dalam kepanitiaan diharapkan pemahaman tentang manajemen dan tanggungjawab di dalam suatu unit kerja organisasi dan kepartaian.

11. Evaiuasi dan FoBow Up

a. Evaluasi

Evaluasi perkaderan pada dasarnya merupakan pengamatan dan penilaian yang dilakukan secara sadar dan terencana terhadap proses perkaderan sebagai usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa datang. Tujuan dari evaluasi adalah menilai apakah perkaderan yang telah dilaksanakan tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang lelah diterapkan. Bila perkaderan yang telah dilaksanakan dinilai telah mencapai hasil yang diinginkan, perkaderan tersebut lelah dianggap "berhasil guna".

Evaluasi perkaderan dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang mendekati kebenaran dari hasil perkaderan yang dilaksanakan dengan menggunakan pengukuran tertentu. Evaluasi perlu dilakukan oleh dan terhadap setiap orang yang ada hubungannya dengan proses perkaderan. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap peserta tetapi juga dilakukan terhadap berbagai aspek yang mempunyai hubungan dan pengaruh alas perbaikan kualitas peserta, seperti: peranan instruktur, metode yang digunakan, materi yang disampaikan

⁵⁴ Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi : Partai Demokrat*, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.

atau media yang tersedia serta teknis penyelenggaraan kegiatan perkaderan yang kesemuanya merupakan faktor pendukung dalam rangka menuju keberhasilan sebuah perkaderan.

Arah evaluasi dalam perkaderan adalah demi perbaikan dan penyempurnaan pada proses perkaderan, serta demi pertanggungjawaban pada pasca perkaderan. Evaluasi bukan dimaksudkan untuk menghakimi atau menentukan siapa benar dan siapa yang salah atau siapa yang pandai siapa yang bodoh. Karenanya, pelaksanaan evaluasi dan refleksi dilakukan dengan cara saling memberikan umpan balik, melakukan evaluasi diri atau mengadakan refleksi bersama. Evaluasi dilakukan saat perkaderan sedang berlangsung, dikembangkan pada setiap jenjang perkaderan terhadap aspek-aspek pelatihan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat diperbaiki sesuai dengan tujuan.

Bentuk evaluasi ini dilakukan untuk memantau apa yang dirasakan peserta manyangkut pemahaman materi, suasana dan hubungan antar sesama peserta, instruktur dan panitia, kelengkapan fasilitas/sarana perkaderan dan lain sebagainya. Pelaksanaan evaluasi ini dapat dilakukan setiap hari (evaluasi harian), di pertengahan antara hari pertama dan hari terakhir perkaderan (evaluasi pertengahan), dan di akhir perkaderan (evaluasi akhir).

Evaluasi terhadap perkaderan yang benar harus dilakukan dalam empat tahap dan tiap tahapannya mempunyai tujuan dan tolak ukur yang berbeda- Empat jenis pengukuran keefektifan perkaderan tersebut adalah, keefektifan pelaksanaan

perkaderan, penyerapan/retensi materi, dampak dari perkaderan pada perilaku kerja, dampak pada kinerja organisasi.

Pendapat dari peserta yang merupakan umpan balik bagi pelatih misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan substansi materi, metodologi, media dan teknis penyelenggaraan perkaderan dapat digali melalui lembar evaluasi yang dirancang untuk keperluan itu, atau melalui diskusi pleno secara terbuka yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk mengungkapkan secara bebas apapun yang hendak diungkapkan. Cara lain yang cukup efektif dalam mendapatkan umpan balik dari peserta adalah berbaur dengan mereka tanpa harus merasa mempunyai jarak, dan mengembangkan dialog-dialog informal saat istirahat atau waktu lain diluar jam/sessi perkaderan. Melalui obrolan informal banyak hal yang tidak terungkap dalam evaluasi formal (tertulis maupun lisan) dapat diketahui melalui cara ini.⁵⁵

Para instruktur hendaknya mengadakan pertemuan rutin setiap harinya untuk membahas umpan balik yang diterima dari para peserta dan menindaklanjuti hal-hal yang berkembang dalam perkaderan, yang memerlukan penanganan segera.

b. Follow Up

Follow Up perkaderan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah proses

⁵⁵ Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi : Partai Demokrat*, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.

pelaksanaan perkaderan akan berakhir, guna merancang kegiatan lebih lanjut peserta pasca perkaderan. Kegiatan Follow Up ini merupakan bagian dari sistem perkaderan untuk mengetahui perkembangan hasil perkaderan pada diri setiap alumni perkaderan, maupun pengaruhnya terhadap perkembangan Partai.

Follow Up diberikan kepada seluruh peserta perkaderan formal. Jadi Follow Up bukan hanya diadakan untuk para peserta yang lulus perkaderan formal saja tetapi untuk yang dinyatakan tidak lulus perkaderan tetap dibina oleh partai. Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, tentang follow up:

"Follow Up bukan hanya diberikan kepada peserta yang lulus saja, tetapi untuk peserta yang tidak luluspun tetap akan dibina oleh partai. Kalau follow up dari perkaderan formal adalah perkaderan Non-Formal dan perkaderan Informal"⁵⁶

Perkaderan non-formal dan perkaderan informal yang diadakan oleh partai adalah sebuah bentuk follow up dari perkaderan formal yang dilakukan oleh pengurus partai untuk lebih meningkatkan kemampuan kader, baik secara teori maupun secara aplikasi di lapangan. Selain dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengetahui pertanggungjawaban alumni perkaderan, kegiatan penyusunan follow up juga dapat digunakan sebagai sarana pemantauan/monitoring dan upaya untuk tetap menjalin hubungan antara alumni perkaderan dan instruktur.

⁵⁶ Wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dikantor DPD Partai Demokrat, Juli 2011 Pukul 14 : 15 WIB

12. Pemantauan

Pada pemantauan pasca perkaderan inilah sesungguhnya manfaat suatu perkaderan pada diri setiap alumninya dapat diketahui secara objektif. Para alumni perkaderan diuji oleh kehidupan nyata dalam masyarakat tentang berbagai hal yang mereka peroleh selama mengikuti perkaderan. Masyarakat menilai dan memberikan reaksi perkembangan wawasan, ketrampilan dan sikap alumni perkaderan. Masyarakat juga menilai tingkat kelayakan dan kemanfaatan dari rencana program atau kegiatan yang dirumuskan peserta sebagai suatu hasil (produk) perkaderan.⁵⁷

Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Partai pada berbagai tingkat yang menyelenggarakan perkaderan kader hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan alumni perkaderan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta hal-hal lain yang menyangkut realisasi rencana program/kegiatan sebagai tindak lanjut perkaderan.

B. Analisis Sistem dan Bentuk Perkaderan

Rekrutmen kader partai Partai Demokrat adalah dilakukan melalui proses penerimaan, seleksi, dan promosi yang didasarkan pada sejumlah kriteria dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh partai. Adapun pengembangan kader dilakukan melalui perkaderan formal, non-formal, informal.

⁵⁷ Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi : Partai Demokrat*, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.

Yang dimaksud dengan perkaderan formal adalah pengembangan kader partai yang ditempuh melalui proses perkaderan yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berjenjang. Perkaderan non-formal adalah proses pengembangan kader partai yang dilakukan tidak terstruktur dan tidak berjenjang, melalui berbagai pelatihan pengembangan keterampilan, profesi, dan keahlian fungsional. Perkaderan Informal adalah perkaderan yang dilakukan dengan melibatkan kader di dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh partai seperti kepanitiaan dan lain sebagainya.

Tujuan dari perkaderan Partai adalah memfasilitasi terciptanya kader bangsa yang berkepribadian nasionalis yang dilandasi dengan semangat keagamaan, yakni beriman kepada Tuhan Sang Pencipta dan dapat menyebarkan kasih sayang Tuhan di muka bumi, memiliki sikap dan semangat pembaharuan yang berorientasi masa depan, serta memiliki keterampilan kepemimpinan yang tangguh, sehingga mampu memperjuangkan cita-cita politik dan program perjuangan partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mampu memberikan jaminan bagi pembangunan nasional berkelanjutan.

1. Perkaderan Formal

Tujuan dibuatkannya draft perkaderan tersebut adalah sebagai acuan dan pedoman nantinya bagi pimpinan dan fungsionaris partai di semua tingkatan dalam melakukan program perkaderan, untuk mempersiapkan kepemimpinan partai bangsa, dan negara dimasa yang akan datang, yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dengan bekal keiklasan dan

semangat nasionalis serta religius diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam menjalankan roda organisasi serta berkesanggupan memperjuangkan cita-cita dan perjuangan politik partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁸

Perkaderan sebagai bagian dari pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi kekuatan politik, merupakan usaha meningkatkan kesadaran politik dan pencapaian cita-cita perjuangan politik partai. Karenanya, merupakan upaya sadar dan terencana untuk lebih meningkatkan kualitas kader dan kepemimpinan partai dalam menjalankan program perjuangan partai. Oleh karena itu, pelatihan kader partai pada hakekatnya adalah pendidikan kader-masyarakat, menjadi kader partai yang pada gilirannya menjadi kader bangsa dan negara. Sistem perkaderan merupakan rangkaian usaha pembinaan dan pengembangan kader partai, meliputi seluruh aspek dan wawasan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan mengelola partai secara fungsional.

Agar pelaksanaan perkaderan memiliki nilai strategis, dan mencapai hasil yang mendekati paripurna, maka program perkaderan di lingkungan Partai Demokrat perlu terpola dalam suatu sistem yang bersifat pragmatis, terstruktur, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, dengan tujuan, sasaran, metodologi, materi, kurikulum, evaluasi dan refleksi, serta rencana tindak lanjut yang jelas dan memadai untuk setiap jenjang perkaderan.

⁵⁸ Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi : Partai Demokrat*, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.

Untuk dapat mencetak kader yang mempunyai fungsi dan tugas seperti yang diinginkan oleh Partai Demokrat, yaitu; *pertama* pemersatu, bukan pemecah belah. *Kedua* penggerak bukan elemen pasif. *Ketiga* pembaharu, bukan status quo. *Keempat* pembela, bukan apatis. *Kelima* mediator, bukan masa bodoh. *Keenam* teladan, bukan tercela.⁵⁹ Tidak akan bisa muncul begitu saja di dalam diri kader partai, tetapi hal tersebut harus dipupuk melalui pelatihan yang diadakan oleh pengurus partai salah satunya adalah perkaderan kader formal. Perkaderan formal disini berfungsi untuk melakukan pengembangan terhadap kader Partai Demokrat. Ada empat tingkatan di dalam perkaderan formal Partai tersebut yaitu; Perkaderan Dasar/Pemula, Perkaderan Cabang, Perkaderan Provinsi, Perkaderan Nasional.

Di dalam proses pengembangan kader Partai Demokrat yang dilakukan melalui perkaderan formal disini mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam membentuk kader yang sesuai dengan yang diinginkan oleh P. Demokrat. Dalam empat tingkatan/jenjang yang ada di dalam perkaderan formal tersebut terdapat materi-materi perkaderan yang membahas secara khusus mengenai Partai Demokrat. Hal ini bertujuan agar para kader partai dapat memahami secara utuh dan dapat lebih militan di dalam Partai Demokrat.

Selain tempat pengembangan kader partai, Perkaderan Formal seperti perkaderan Dasar/Pemula juga menjadi sebuah wadah/tempat dalam perekrutan awal dalam proses rekrutmen kader Partai Demokrat itu sendiri. Tetapi di perkaderan pemula/dasar tersebut sikap kader masih dapat berubah-ubah dalam

⁵⁹ Draft Panduan Pengkaderan: *Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi : Partai Demokrat*, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, 2007.

artian kader yang ikut dalam perkaderan tingkat pemula masih bisa pindah ke partai lain dikarenakan pendirian seorang kader yang belum kokoh.

Untuk menyikapi persoalan keyakinan kader partai yang masih berubah-ubah tersebut, agar mempunyai tekad dan keyakinan yang tinggi dalam membela dan mempejuangkan partai yang sesuai dengan harapan Partai Demokrat tersebut maka kader-kader partai haruslah diikutsertakan ke dalam jenjang perkaderan formal. Selain membentuk dan menanamkan keyakinan kader mengenai Partai Demokrat, perkaderan formal juga menjadi sebuah bentuk kualifikasi bagi kader-kadernya untuk menjadi seorang instruktur di dalam perkaderan kader formal tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, tentang kualifikasi Instruktur.

"Untuk menjadi seorang Instruktur di perkaderan formal partai adalah kader tersebut harus mengikuti dan lulus perkaderan TOT (Training Of Trainer) terlebih dahulu dan untuk menjadi seorang instruktur di tingkat Nasional harus lulus perkaderan Nasional dan minimal lulus SI, begitu juga untuk perkaderan yang lain seperti, perkaderan tingkat Provinsi, Cabang dan bahkan tingkat Dasar/Pemula"⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat betapa pentingnya perkaderan formal bagi perkembangan sebuah kaderisasi partai. Tidak sembarangan orang dapat menjadi pelatih di perkaderan formal Partai Demokrat. Kualifikasi untuk menjadi seorang instruktur selain harus mengikuti Training Of

⁶⁰ Wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dikantor DPD Partai Demokrat, Juli 2011 Pukul 14 : 15 WIB

Trainer (TOT), kader juga harus mengikuti dan lulus di perkaderan formal sesuai dengan tingkatannya serta mengantongi sertifikat pendidikan formal minimal S1.

Namun yang menjadi persoalan khususnya saat ini di dalam tubuh DPD Partai Demokrat D.I.Yogyakarta khususnya untuk perkaderan formal adalah belum sempat melaksanakan perkaderan tersebut Hanya perkaderan di tingkat nasional yang sering di ikuti oleh kader di tingkatan nasional (wajib), kader tingkat provinsi (wajib) dan kader di tingkat Cabang (tidak Wajib), yang bertempat di Cipanas, salah satu daerah di Jawa Barat. Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, tentang hasil pelaksanaan perkaderan Formal Partai Demokrat:

"Perkaderan Formal di Partai Demokrat sudah ada panduan baku dan harus dijalankan dan dipatuhi oleh pengurus partai. Di perkaderan formal inilah yang nantinya akan memunculkan kader-kader partai. Tetapi saat ini di tingkatan DPD P. Demokrat D.I.Yogyakarta untuk masa kepengurusan sekarang ini belum pernah terlaksana satupun pelatihan formal, hal tersebut dikarenakan karena keterbatasan dana, perkaderan Formal hanya bisa dilaksanakan di tingkatan nasional saja yang diikuti oleh Kader Tingkat Nasional, Kader Tingkat Provinsi, dan Kader tingkat Cabang, yang wajib mengikuti perkaderan tersebut adalah Kader Nasional dan Kader provinsi, bertempat di Cipanas dan disana perkaderan Provinsi untuk seluruh Indonesia juga diadakan dan tempatnya terpisah satu agenda dengan perkaderan Nasional"⁶¹

Seperti hasil wawancara di atas, di dalam tubuh Partai Demokrat itu sendiri masih mengalami kekurangan, yakni masalah pendanaan kegiatan partai sehingga hal ini berdampak cukup signifikan untuk pengurus partai di tingkat Provinsi

⁶¹ Wawancara dengan Muhammad Muforis, Ketua Devisi Pengembangan Organisasi Partai Demokrat Provinsi D.I. Yogyakarta, dikantor DPD Partai Demokrat, Juli 2011 Pukul 14 : 15 WIB

belum mampu dalam pelaksanaan perkaderan partai. Perkaderan hanya mampu dilakukan pada tingkatan nasional sampai pada tingkat provinsi saja.

Kurangnya pendanaan membawa dampak yang tidak bisa hanya dipandang sebelah mata saja namun harus segera menjadi salah satu agenda pembahasan partai yang penting. Walaupun di tingkat nasional dan provinsi telah mengadakan perkaderan formal namun yang harus juga menjadi perhatian adalah di tingkatan cabang dan ranting yang sebenarnya merupakan basis utama bagi Partai Demokrat.

Fenomena tersebut harus segera disikapi oleh partai yang berlambang bintang ini. Dengan adanya kader-kader tangguh yang lahir dari perkaderan-perkaderan yang diadakan oleh partai baik itu perkaderan formal, non-formal, dan informal yang nantinya dapat bertarung dengan partai-partai yang lain dalam merebut simpati masyarakat dan tentunya untuk memenangkan pemilu. Kader-kader yang lahir dari perkaderan yang diadakan oleh partai itulah yang nantinya akan menjadi tulang punggung bagi partai berlambang bintang tersebut untuk tetap bertahan di kancah perpolitikan baik di tingkatan daerah maupun nasional.

2. Perkaderan Non-Formal dan Informal

Perkaderan non-formal adalah suatu bentuk perkaderan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang, bersifat pembinaan dan pengembangan keterampilan, keahlian, dan atau profesi anggota dan kader partai sebagai upaya peningkatan kualitas dalam mengembangkan potensi kader melalui berbagai berbagai perkaderan pengembangan ketrampilan, profesi, dan keahlian fungsional.

Pengembangan dan pembinaan terhadap kader partai dilakukan melalui perkaderan-perkaderan yang diadakan oleh pengurus partai untuk menunjang dan meningkatkan kualitas dan potensi kader agar dapat menjalankan fungsi dan tugas kader partai sebagaimana yang diharapkan oleh Partai Demokrat itu sendiri yakni kader yang Nasionalis dan Religius. Adapun untuk menjaga ritme kader maka di tingkat DPD bekerjasama dengan pengurus DPC, DPAC, dan DPRt Partai Demokrat D.I. Yogyakarta mengadakan perkaderan-perkaderan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan potensi kader, di antaranya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Kegiatan Training dan Perkaderan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Perkaderan Recruiting Massa	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tentang tata cara perekrutan massa 	Kabag Pendidikan dan Peningkatan SDM
2	Perkaderan Saksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tugas saksi dalam Pemilu • Peserta siap untuk menjalankan Tupoksinya 	Kabag Pendidikan dan Peningkatan SDM
3	Perkaderan Jurkam	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tatacara menjadi Jurkam yang baik • Peserta mampu menjadi Jurkam yang baik • Peserta mampu merekrut massa 	Kabag Pendidikan dan Peningkatan SDM
4	Perkaderan Calon Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tentang Tupoksi legislatif 	Kabag Pendidikan dan Peningkatan SDM
5	Pelatihan (Simulasi) Calon Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tentang tata cara pencontrengan • Peserta siap untuk mencontreng Partai Demokrat 	Kabag Pendidikan dan Peningkatan SDM
6	Perkaderan publik Speaking	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tentang tatacara berbicara di depan umum 	Kabag Pendidikan dan Peningkatan

		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta siap menjadi PKPD Partai Demokrat 	SDM
7	Perkaderan Penyusunan Proposal	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tentang tatacara penyusunan proposal yang baik. • Peserta data-data funding • Peserta paham tentang tatacara membangun kemitraan dengan pihak lain 	Kabag Pendidikan dan Peningkatan SDM
8	Perkaderan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tentang tatacara berwirausaha yang baik • Peserta siap menjadi KPP P. Demokrat 	Kabag Pendidikan dan Peningkatan SDM

Sumber data: Dokumen DPD Partai Demokrat D.I. Yogyakarta

Dari tabel di atas, saat ini DPD Partai Demokrat D.I. Yogyakarta telah mempersiapkan berbagai macam perkaderan yang tengah dipersiapkan untuk meningkatkan kemampuan kader baik dari segi teoritis maupun teknis.

Dari beberapa perkaderan yang diadakan oleh DPD Partai Demokrat D.I. Yogyakarta di atas yang baru bisa dilaksanakan adalah Pelatihan (Simulasi) Calon Pemilih, dalam pelatihan ini ada yang terkesan bersifat aksidental saja dalam artian pelatihan yang diadakan hanya untuk menyambut sebuah momen tertentu seperti pemilihan umum (Pemilu).

Tabel 3.5

Simulasi Calon Pemilih

Sleman tanggal 17 Februari 2008 dan Gunung Kidul tanggal 1 Maret 2008

JAM	HARI I
08.00 – 10.00	Pembukaan dan Orasi Ilmiah Ketua DPD Partai Demokrat
10.00 – 12.00	Bina Suasana dan Orientasi Penyuluhan
13.15 – 15.15	Pengenalan Sistem Pemilihan Umum
15.45 – 17.00	Aplikasi/Praktek Cara Mencontreng

Sumber data: Dokumen DPD Partai Demokrat D.I. Yogyakarta

Perkaderan ini memang sangat diperlukan oleh kader-kader partai dalam menyongsong dan mensukseskan partai dalam sebuah momentum yang cukup besar seperti Pemilu. Tetapi kalau dilihat dari perkaderan yang diadakan tersebut sedikit terkesan dipaksakan seperti: Perkaderan Recruiting Massa dan Perkaderan Jurkam, hal tersebut dikarenakan perkaderan tersebut diadakan dikarenakan ada sebuah moment besar yang akan ditutupi.

Sebenarnya perkaderan-perkaderan tersebut dapat dilakukan jauh-jauh hari, sebab apabila diadakan jauh-jauh hari sebelum mendekati momen pemilu maka hasil yang didapatkan dari perkaderan tersebut akan lebih maksimal ketika dibandingkan dengan perkaderan yang diberikan dengan waktu yang relatif singkat. Ketika perkaderan recruiting massa diadakan jauh-jauh hari sebelum menghadapi momen politik yang cukup bergengsi seperti pemilu nasional, kader-kader partai sudah dapat menerapkan ilmu yang mereka miliki tersebut dalam menjaga massa yang mereka miliki dan dapat dengan segera menggalang massa pendukung yang belum masuk ke dalam kategori kantong-kantong massa partai. Persoalan tersebut dengan sendirinya akan sedikit dapat meringankan pekerjaan kader-kader partai ketika akan menghadapi momen politik seperti pemilu.